

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini sulit dikatakan bahwa suatu negara bisa hidup sendirian sepenuhnya tanpa berhubungan dengan negara lain. setiap negara pasti akan memiliki kepentingan terhadap negara lain mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Maka untuk memenuhi kepentingan dalam negeri negaranya, diambil kebijakan politik luar negeri.

Dalam masa revolusi nasional, dilaksanakan dua cara pelaksanaan politik luar negeri yang sangat berbeda dan bersaing. Cara pertama adalah dengan cara diplomasi yang merupakan alat yang digunakan untuk menjamin penyerahan kedaulatan. Sedangkan cara kedua yaitu dengan cara perjuangan yang timbul dari suatu keyakinan bahwa kemerdekaan sejati dapat dicapai melalui konfrontasi yang penyelesaiannya secara militer¹.

Pengertian politik luar negeri menurut Gibson yang dikutip dari S.L. Roy yaitu suatu rencana koferensif yang dibuat dengan baik, didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan bisnis pemerintahan dengan negara lain yang ditujukan pada peningkatan dan perlindungan bangsa².

¹ Michael Leifer, *Politik Luar Negeri Indonesia*, 1989, hal. Xii

² S. L. Roy, *Diplomasi*, 1991, hal. 31

Dalam beberapa hal, politik luar negeri memang agak sulit dibedakan dengan istilah diplomasi. Namun sebenarnya terdapat perbedaan diantara keduanya. J.R. Child mencoba menjelaskan perbedaan ini dengan singkat, bahwa menurutnya : politik luar negeri suatu negara adalah “substansi hubungan luar negeri”, sedangkan diplomasi adalah proses dengan mana kebijakan dilaksanakan sehingga dapat dikatakan bahwa politik luar negeri adalah substansi sedangkan diplomasi adalah metodenya ³.

Setiap negara pasti memiliki tujuannya sendiri dan untuk memenuhi hal itu suatu negara perlu menyusun politik luar negerinya, begitu pula dengan Indonesia. Dewasa ini, memang Indonesia merupakan salah satu negara yang mengedepankan persahabatan di dunia, khususnya di Asia. Sejumlah program dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk menjalin persahabatan di kalangan para pemuda di Asia dalam rangka menjaga kestabilan politik luar negerinya. Namun apabila menengok ke belakang, banyak dari kebijakan luar negeri Indonesia yang menimbulkan kesan buruk bagi negara-negara di Asia, dalam hal ini khususnya bagi Malaysia.

Kepentingan nasional untuk menunjukkan karakter adalah dengan menonjolkan karakter bangsa Indonesia yang merupakan bangsa mandiri dan tidak bersedia berada dibawah tekanan bangsa lain. Oleh sebab itu, pada masa kepemimpinan Soekarno sangat menolak segala bentuk penjajahan oleh negara lain. Sesuai dengan prinsip dan sifat politik luar negeri yang dianut pada masa orde lama yaitu bebas aktif, anti-imperialisme serta anti-kolonialisme.

³Ibid, hal. 31-33

Politik bebas aktif Indonesia bukanlah suatu politik netralisme dan dalam hubungannya dengan non-agligment, Indonesia berpendirian bahwa politik non-agligment juga bukan politik yang netralisme. Oleh karena hakikat non-agligment itu adalah aktif, maka diplomasi Indonesia senantiasa diarahkan untuk menempatkan Indonesia pada posisi subyek dan bukan sebagai obyek dalam pergolakan politik Internasional.

Indonesia dimasa lampau menentang Malaysia oleh karena menganggap bahwa Malaysia merupakan suatu proyek neo-kolonialisme Inggris, yang membahayakan revolusi Indonesia, suatu pangkalan militer asing yang ditunjukan antara lain kepada Indonesia untuk menentang Indonesia dan juga menentang New Emerging Force di Asia Tenggara⁴.

Pada masa konfrontasi dengan Malaysia, hubungan politik luar negeri Indonesia semakin militan. Konsep bebas aktif tidak menjadi ciri khas pada masa ini melainkan lebih kearah negara-negara beraliran komunis. Hal ini ditandai keluarnya Indonesia sebagai anggota PBB sebagai bentu protes diterimanya Malaysia sebagai anggota sementara di PBB.

Setelah keluar dari PBB Indonesia dibawah pemerintahan Soekarno bekerjasama dengan Republik rakyat Cina dan mendirikan Conefo (The Conference of New Emerging Force) bermarkas besar di Jakarta. Organisasi yang dibentuk oleh Indonesia dan Cina berharap dapat menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi

⁴ Marwati Djoenod Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. 1993, hal. 354

negara-negara miskin. Negara komunis lainnya seperti Korea Utara dan Vietnam Utara tertarik untuk bergabung dengan kelompok baru ini. Poros Peking-Pyongyang-Hanoi-Jakarta terbentuk dengan aksi dan orientasi anti Barat.

Politik poros tersebut telah mengakibatkan:

- a. Menjadi sempitnya ruang gerak Indonesia, terutama ruang gerak diplomasinya di forum internasional.
- b. Penyimpangan secara prinsipil dari dasar-dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif menuju perdamaian dunia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- c. Memasukkan Indonesia ke dalam lingkungan strategi politik RRC⁵.

Selama konfrontasi banyak yang dilakukan Indonesia untuk tetap menjalankan politik luar negeri dengan negara lain. Banyaknya kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia untuk memperbaiki perekonomian dalam negeri, baik melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral.

Konfrontasi melawan Malaysia ternyata juga mempersulit kedudukan Indonesia dalam percaturan Internasional. Terutama negara-negara barat memencilkan Indonesia dan bersimpati kepada Malaysia. Hanya Republik Rakyat Cina yang menunjukkan minatnya “membantu” Indonesia⁶. Bantuan dana yang diberikan Perdana Menteri Cina kepada Indonesia merupakan bentuk kepedulian Cina kepada Indonesia. Bukan hanya bantuan berbentuk dana yang diberikan Cina kepada Indonesia tetapi juga dari segi militer yaitu bantuan senjata.

⁵ *Ibid*, hal. 353-354

⁶ Drs. G. Moedjanto, M. A. *Indonesia Abad ke-20 Jilid 2*. 1998. Hal. 119.

Hubungan dengan negara komunis lainnya yaitu dengan negara Vietnam Utara, hubungan yang terjalin antara Vietnam sangat erat hal ini ditandai dengan terbentuknya apa yang dikenal sebagai poros Jakarta-Hanoi-Phom Penh-Beijing-Pyongyang. Dari hubungan yang terjalin sehingga Soekarno memutuskan untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan Hanoi dari tingkat konsulat menjadi tingkat Duta Besar. Serta Indonesia memutuskan untuk mengakui Front Pembebasan Nasional Vietnam Utara (*NLF-SV-National Liberation Front of South Vietnam*) dan mengizinkan pembukanaan kantor perwakilannya di Jakarta⁷.

Selain menjalin hubungan dengan negara-negara Komunis, Indonesia juga menjalin hubungan dengan Jepang. Hubungan yang terjalin antara Jepang dengan Indonesia tidak bersifat politik tetapi lebih kearah kerjasama ekonomi. Ketika terjadi konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, perdana Menteri Ikeda berusaha bertindak sebagai penengah dan memanfaatkan hubungan baiknya dengan Indonesia untuk membantu mencari penyelesaian konflik tersebut⁸.

Selain kerjasama bilateral, Indonesia juga menjalankan kerjasama Multilateral. Hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan banyak negara tergabung dalam organisasi. Conefo adalah organisasi kerjasama yang banyak membantu Indonesia dalam menyelesaikan masalah politik luar negerinya. Hubungan kerjasama yang terjalin ini tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga menjaga stabilitas keamanan negara.

⁷ Leo Suryadinata, *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*, 1998, hal. 159.

⁸ Abdul Irsan, *Jepang Politik Domestik, Global dan Regional*. 2005, hal. 170

Berdasarkan alasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai politik luar negeri Indonesia dengan negara lain pada masa terjadinya konfrontasi dengan Malaysia tahun 1963-1965 dalam sebuah judul “Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Konfrontasi Dengan Malaysia Tahun 1963-1965”.

B. Analisis Masalah

B.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hubungan politik luar negeri Indonesia selama terjadinya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia lebih mengarah pada negara-negara Komunis.
2. Hubungan Indonesia dengan negara lain yang bersifat ekonomi dari pada politik.
3. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara komunis.
4. Hubungan Multilateral antara Indonesia dengan negara lain yang terjalin dalam bentuk organisasi.
5. Proses haluan politik luar negeri Indonesia dengan negara lain pada masa konfrontasi dengan Malaysia tahun 1963-1965.

B.2. Pembatasan Masalah

Agar tidak terlalu luas dalam penelitian ini maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu pada Proses haluan politik luar negeri Indonesia dengan negara lain pada masa konfrontasi dengan Malaysia tahun 1963-1965.

B.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Proses Haluan Politik Luar Negeri Indonesia dengan negara lain pada masa Konfrontasi Dengan Malaysia tahun 1963-1965?.

C. Tujuan, Kegunaan, dan Ruang Lingkup Penelitian

C.1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah suatu cara untuk menemukan mengembangkan dan membuktikan pengetahuan dan tujuan penelitian secara khusus adalah salah satu konsep dalam penelitian untuk menemukan suatu arti pengetahuan yang sebelumnya belum pernah ada ataupun belum diketahui⁹

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses haluan politik luar negeri Indonesia dengan negara lain pada masa konfrontasi dengan Malaysia tahun 1963-1965.

C.2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang kesejarahan khususnya politik luar negeri indonesia dengan negara lain selama konfrontasi dengan Malaysia.
2. Dapat mengetahui apa yang menjadi latar belakang terjadinya konfrontasi.

⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, 1997, hal. 290

3. Dapat mengetahui alasan penyelesaian konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia
4. Sebagai materi perkuliahan Sejarah Politik dan Hubungan Internasional dan Sejarah Hubungan Internasional.
5. Sebagai materi bahan ajar SMP kelas IX dan SMA kelas XII.

C.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah Politik Luar Negeri Indonesia dengan negara lain pada masa konfrontasi. yang menjadi objek penelitian ini adalah politik luar negeri Indonesia pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia. Sedangkan yang menjadi subjeknya adalah negara-negara yang menjalin hubungan dengan Indonesia pada masa konfrontasi dengan Malaysia. Tempat penelitian ini dilakukan di perpustakaan Universitas Lampung dan Perpustakaan Daerah Tingkat 1 Bandar Lampung. Batasan waktu objek yang diteliti adalah sejak tahun 1963 sampai tahun 1965 dan waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tahun 2009-2010.